

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat telah lama dibahas dan digaungkan di berbagai tempat dan lingkungan. Idennya adalah supaya masyarakat atau sebanyak-banyaknya individu, bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung inisiatif pembangunan agar menjadi lebih sempurna, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih berhasil (Sembel et al., 2017). Masyarakat kini menjadi subjek pembangunan, bukan objek, dan berperan dalam mengkomunikasikan tujuan, mengambil keputusan, memanfaatkan peluang, dan menyelesaikan masalah. Untuk memastikan bahwa pembangunan desa memenuhi setiap kebutuhan masyarakat, keterlibatan masyarakat diperlukan di seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan (Mustanir et al., 2018).

Secara teoritis pembangunan ditunjukkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, maka partisipasi masyarakat merupakan salah satu dari banyaknya unsur yang sangat menentukan kesuksesan pelaksanaan pembangunan, baik sebagai suatu sistem yang utuh ataupun sebagai perorangan yang menjadi bagian yang sangat integral dan memiliki dampak yang signifikan pada dinamika proses pembangunan. Untuk itu, masyarakat memikul tanggung jawab yang sama besarnya terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan seperti halnya pemerintah. Salah satu kunci pembangunan yang efektif adalah kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat; dalam situasi ini, kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa tujuan pembangunan telah tercapai (Akbar et al., 2018).

Menurut Nurman (2015) dalam (Sangian et al., 2018) Salah satu metode untuk mendefinisikan kebutuhan pembangunan desa dan daerah yang menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Menurut teori ini, dalam perencanaan pembangunan lokal dan pembuat kebijakan ditempatkan pada anggota masyarakat sebagai lapisan terbawah.

Sasaran pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakat adalah terjadinya peningkatan pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk menjamin bahwa proses pembangunan sepenuhnya bersumber dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, penting untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk aktif ikut serta dalam tahapan perencanaan proyek pembangunan yang diusulkan. Terutama dalam menetapkan prioritas pelaksanaan proyek di tingkat desa, aspek ini menjadi krusial. Pada hakikatnya, upaya dan penemuan yang muncul dari rasa kesadaran serta tanggung jawab masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang berkembang dari bawah. Hal ini mutlak diperlukan mengingat sifat pembangunan desa atau kelurahan yang umumnya dilaksanakan di bawah arahan, pengawasan, bantuan, dan bimbingan pemerintah untuk memastikan bahwa harapan-harapan dapat tercapai dengan baik (Sembel et al., 2017).

Di Indonesia sendiri telah menganut sistem otonomi daerah dimana kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri untuk mengatur daerahnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk memprioritaskan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan daerah masing-masing, otonomi daerah berupaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Sistem otonomi daerah mencakup desa dan kabupaten/kota. Dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pelayanan publik dan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam konteks pembangunan otonomi daerah, diperlukan kapasitas pemerintah untuk mengoordinasikan berbagai kebijakan melalui penyusunan suatu kerangka kerja yang terstruktur (Kholik, 2020).

Salah satu elemen yang mempengaruhi bagaimana suatu wilayah berkembang adalah manusia. Oleh karena itu, untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif di masa sekarang ini dan masa depan, diperlukan SDM yang berkualitas. Meningkatkan pembangunan manusia sangat penting karena sumber daya manusia menentukan kualitas hidup dan tingkat percepatan pertumbuhan daerah (Maulana et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan penuh atas wilayahnya, memainkan peran penting dalam membina masyarakat yang lebih baik di samping inisiatif pembangunan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (jatim.bps.go.id, 2023), IPM Kabupaten Gresik mengalami peningkatan sebanyak 0,66 persen pada tahun

2021 sampai 2022. Pada tahun 2021, Kabupaten Gresik memiliki skor 76,50 persen, yang kemudian naik menjadi 77,16 persen pada tahun 2022. Perkembangan capaian nilai IPM Kabupaten Gresik menandakan usaha-usaha pembangunan manusia berjalan dengan baik.

**Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
2021-2022**

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	IPM Menurut Kabupaten/Kota (dalam %)	
	2021	2022
Kabupaten Pacitan	68.57	69.37
Kabupaten Ponorogo	71.06	71.87
Kabupaten Trenggalek	70.06	71.00
Kabupaten Tulungagung	73.15	74.06
Kabupaten Blitar	71.05	71.86
Kabupaten Kediri	72.56	73.46
Kabupaten Malang	70.60	71.38
Kabupaten Lumajang	66.07	66.95
Kabupaten Jember	67.32	67.97
Kabupaten Banyuwangi	71.38	71.94
Kabupaten Bondowoso	66.59	67.31
Kabupaten Situbondo	67.78	68.25
Kabupaten Probolinggo	66.26	66.96
Kabupaten Pasuruan	68.93	69.68
Kabupaten Sidoarjo	80.65	81.02
Kabupaten Mojokerto	74.15	74.89
Kabupaten Jombang	73.45	74.05
Kabupaten Nganjuk	71.97	72.93
Kabupaten Madiun	71.88	72.39
Kabupaten Magetan	74.15	74.85
Kabupaten Ngawi	71.04	71.75
Kabupaten Bojonegoro	69.59	70.12
Kabupaten Tuban	68.91	69.67
Kabupaten Lamongan	73.12	74.02
Kabupaten Gresik	76.50	77.16

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	IPM Menurut Kabupaten/Kota (dalam %)	
	2021	2022
Kabupaten Bangkalan	64.36	65.05
Kabupaten Sampang	62.80	63.39
Kabupaten Pamekasan	66.40	66.99
Kabupaten Sumenep	67.04	67.87
Kota Kediri	78.60	79.59
Kota Blitar	78.98	79.93
Kota Malang	82.04	82.71
Kota Probolinggo	73.66	74.56
Kota Pasuruan	75.62	76.54
Kota Mojokerto	78.43	79.32
Kota Madiun	81.25	82.01
Kota Surabaya	82.31	82.74
Kota Batu	76.28	77.22
Jawa Timur	72.14	72.75

(Sumber: jatim.bps.go.id, 2023)

Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten Sidoarjo, IPM Kabupaten Gresik memiliki angka ketertinggalan yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Sidoarjo mencapai 81,02 persen, dimana IPM Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori sangat tinggi menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) karena berada pada angka di atas 80. Sedangkan Kabupaten Gresik sendiri masih termasuk ke dalam kategori tinggi karena masih berada pada angka di bawah 80. Sebagai daerah penyokong Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi wilayah yang serupa, diantaranya adalah industri, pariwisata, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat. Namun Kabupaten Gresik masih tertinggal 3.86 persen dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerahnya. Diharapkan Kabupaten Gresik dapat segera menyusul Kabupaten Sidoarjo menuju kategori sangat tinggi dengan memanfaatkan peluang

untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengembangkan seluruh potensi dalam sebuah lingkungan, pemerintah harus memberikan kepercayaan dan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk merealisasikan potensinya. Hal ini menyiratkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan sangat menentukan kesuksesan pembangunan itu sendiri, sehingga pembangunan harus menjadi bagian dari masyarakat (Sari & Prabawati, 2020).

Pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dari wilayah yang paling kecil, yaitu desa, yang mana merupakan aspek krusial dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan bersama (Ariadi, 2019). Untuk memberikan hasil yang nyata, dalam arti di satu sisi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan di sisi lain dapat mendorong munculnya semangat membangun di kalangan masyarakat melalui partisipasi dalam kegiatan pembangunan, pemerintah memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan pembangunan desa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Mustanir et al., 2018). Pembangunan yang sering dilakukan di beberapa Desa adalah pembangunan dengan mengeksplorasi potensi desa yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan konsep ekowisata untuk meningkatkan pariwisata adalah salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lokal. Dalam hal ini, pariwisata memainkan peran penting dalam upaya konservasi dengan meningkatkan ekonomi lokal dan mendorong peningkatan tingkat toleransi terhadap keanekaragaman budaya (Harahab et al., 2020).

Namun pengembangan ekowisata sampai saat ini peran aktif masyarakat secara umum cukup kurang. Permasalahan ini pun terletak pada kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal serta tidak adanya motivasi masyarakat baik warga setempat maupun secara nasional (Priherdityo, 2015). Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang termuat dalam laman Cnnindonesia.com (2015) sebagai berikut :

“...menurut Endang Karlina, peneliti ekowisata dari Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permasalahan ekowisata di Indonesia bukan terletak dari potensinya, namun lebih karena masalah pengembangan potensi yang dimiliki dimana salah satunya berangkat dari permasalahan partisipasi masyarakat.”

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151211202802-269-97684/ekowisata-indonesia-besar-potensi-minim-optimalisasi> (Diakses 27 November 2023).

Hal tersebut selaras dengan permasalahan di Desa Sukorejo dalam mengembangkan potensi desanya yang berkaitan dengan masyarakatnya. Pemerintah setempat pun terlihat belum maksimal dalam pengembangan ini dengan belum membentuk regulasi yang mengaturnya. Adapun regulasi yang dimaksud yaitu peraturan atau surat keputusan terkait dengan ekowisata mangrove kali lamong agar lebih tertib dalam pengaturan baik bagi masyarakat dan wisatawan, perlindungan lingkungan, serta pengelolaan ekowisata mangrove kali lamong. Regulasi memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan ekowisata mangrove kali lamong, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan wisatawan, masyarakat lokal, dan lingkungan.

Desa Sukorejo merupakan desa dengan total penduduk sebanyak 1.884 jiwa yang terletak di kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang berada di bantaran

Kali Lamong, perbatasan antara Gresik dan Surabaya. Desa Sukorejo sendiri memiliki potensi alam yaitu hutan mangrove dimana mangrove ini tumbuh di sepanjang sempadan Kali Lamong sebagai pelindung dari luapan air sungai sehingga menahan air agar tidak terjadi banjir. Berdasarkan hasil pra-wawancara dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pada mulanya masyarakat desa sukorejo belum memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensi tersebut. Pada area sekitar mangrove tersebut justru digunakan sebagai lahan penumpukan sampah, padahal masih terdapat aktivitas nelayan pula di sana. Sebagai tempat konservasi, area mangrove tersebut seharusnya bersih dan dijaga oleh masyarakat setempat sehingga mangrove pun dapat bekerja dengan baik dalam menahan aliran Sungai kali lamong. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah Desa Sukorejo membuat suatu perubahan yaitu dengan menggandeng Petrokimia Gresik mengubah wilayah bantaran Sungai kali lamong yang mulanya hanya ditumbuhi mangrove dan penuh dengan tumpukan sampah kemudian dikembangkan menjadi sebuah ekowisata yang menumbuh kembangkan UMKM, edukasi, dan pelestarian lingkungan dengan menyadarkan masyarakat desa dan saling bertukar pikiran untuk menangani hal tersebut. Sebagaimana kutipan dalam salah satu portal berita online jatim.antaranews.com (2023) sebagai berikut:

“Petrokimia Gresik bersama masyarakat Desa Sukorejo berkolaborasi dan berhasil mengubah kawasan sempadan sungai Kali Lamong dari semula hanya sebagai tempat pembuangan sampah menjadi ekowisata mangrove yang nyaman untuk dikunjungi serta dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.”

Sumber : <https://jatim.antaranews.com/berita/729411/petrokimia-gresik-dukung-pengelolaan-lingkungan-di-jawa-timur> (Diakses tanggal 30 Maret 2024).

Kepala desa dan masyarakat desa bersama CSR Petrokimia Gresik bergotong royong menanam ribuan bibit mangrove di sepanjang bantaran Sungai Kali Lamong, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah tempat wisata yaitu Ekowisata Mangrove Kali Lamong dengan beragam pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan sebagai pelestarian lingkungan. Sebagaimana kutipan yang dimuat dalam salah satu portal berita online Beritajatim.com (2023) sebagai berikut :

“...menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik, Sri Subaidah menuturkan, penanaman ribuan bibit mangrove itu memiliki banyak manfaat, termasuk diantaranya manfaat ekonomi bagi warga Desa Sukorejo.”

Sumber : <https://beritajatim.com/ekbis/5-100-bibit-mangrove-ditanam-di-bantaran-kali-lamong-gresik/> (Diakses 27 November 2023)

Berdasarkan penelitian (Umanahu et al., 2018) pula menyatakan bahwa satu diantara program alternatif yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah ekowisata. Hal ini karena dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerusakan ekosistem mangrove dan membangun infrastruktur serta fasilitas pendukung untuk pengelolaan dan pelayanan pengunjung yang diperlukan untuk pengembangan ekowisata yang berkelanjutan untuk menarik wisatawan.



Gambar 1. 1 Ekowisata Mangrove Kali Lamong di Desa Sukorejo
(Sumber: Pokdarwis)

Pengembangan Ekowisata sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, dimana dalam pasal 3 menyebutkan bahwa “pengembangan ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan”. Kemudian disebutkan pula bahwa konservasi diharapkan dapat melindungi, merawat, dan memanfaatkan dengan lestari sumberdaya alam yang digunakan dalam kegiatan ekowisata serta mengubah sikap masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan budaya untuk memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen yang kuat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata menjadi esensial. Hal ini termasuk mempertimbangkan kearifan lokal serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang dipegang oleh masyarakat setempat.

Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman bibit mangrove dan pembangunan sarana prasarana wisata menunjukkan kesadaran, kepedulian serta tanggung jawab masyarakat dalam pentingnya pengembangan ekowisata mangrove kali lamong untuk mewujudkan lingkungan yang lestari dan sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang secara aktif mengerahkan seluruh tenaga dan kreatifitasnya dalam mendukung pengembangan Ekowisata Mangrove Kali Lamong dengan menciptakan fasilitas yang menarik untuk menarik pengunjung. Dibentuk pula Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

sebagai pengelola Ekowisata dimana merupakan warga asli desa Sukorejo. Penjual serta penyewa atraksi ekowisata mangrove kali lamong pun merupakan warga lokal yang menunjukkan bahwa penduduk lokal di sekitar destinasi ekowisata berperan secara aktif dalam proses pembangunan, baik sebagai penyedia daya tarik ataupun penyedia layanan bagi pengunjung.

Sebagaimana dimuat dalam portal berita online lampumerah.id (2023), Desa Sukorejo dikategorikan menjadi desa mandiri dengan indikator desa ini pernah meraih sejumlah penghargaan yaitu dinobatkan sebagai Desa ‘Tangguh’ oleh Kapolda Jawa Timur pada tahun 2021 atas kerja keras Pemerintah Desa (Pemdes)-nya yang dinilai berhasil menangani pandemi Covid-19, tertib lalu lintas, serta keamanan lingkungan. Selain itu, Desa Sukorejo juga meraih penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) untuk desa dengan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada tahun 2022, yang membuktikan bahwa Desa Sukorejo mampu secara aktif membangun desa yang tentunya atas kerjasama pemerintah desa dengan keterlibatan peran serta masyarakat yang mendukungnya (sumber: <https://lampumerah.id/wisata-edukasi-mangrove-cara-desa-sukorejo-atasi-abrasi-kali-lamong/> diakses 30 Maret 2024).

Tabel 1. 2 Pendapatan Nelayan Sebelum dan Sesudah Adanya Ekowisata Mangrove Kali Lamong

Nama Nelayan	Pendapatan Sebelum (/bulan)	Pendapatan Sesudah (/bulan)
Mulyadi	Rp2.100.000	Rp2.350.000
Aspiyan	Rp2.400.000	Rp2.700.000
Bambang Sampurno	Rp2.300.000	Rp2.500.000

Nama Nelayan	Pendapatan Sebelum (/bulan)	Pendapatan Sesudah (/bulan)
Slamet Mujiono	Rp2.400.000	Rp2.750.000
Aspin	Rp2.200.000	Rp2.450.000
Asari	Rp2.100.000	Rp2.500.000
Alamin	Rp2.200.000	Rp2.400.000
M. Khotib	Rp2.150.000	Rp2.450.000
Sumantri	Rp2.400.000	Rp2.700.000
Willy Maksuin	Rp2.300.000	Rp2.500.000

(Sumber: Komunitas Nelayan Rukun Jaya, diolah oleh peneliti, 2024)

Dari data yang tercantum dalam tabel 1.2, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan bagi nelayan yang tinggal di Desa Sukorejo. Peningkatan ini dipicu oleh dampak positif yang ditimbulkan oleh ekowisata mangrove kali Lamong karena nelayan juga menyewakan perahu milik mereka sebagai atraksi di ekowisata mangrove kali lamong. Karena sebagian besar masyarakat Desa Sukorejo bermatapencaharian sebagai nelayan, adanya pengembangan ekowisata mangrove kali lamong ini penting dilakukan melihat adanya peningkatan pendapatan yang terjadi.

Berdasarkan observasi peneliti, selain penyewaan perahu, ekowisata mangrove kali lamong juga menyediakan atraksi dan fasilitas lain yaitu lokasi *outbond* untuk anak-anak, studi informasi mengenai mangrove, pondok gazebo untuk bersantai, cctv keamanan, kamar mandi, tempat sampah, serta kantin (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan pangan pengunjung. Terdapat pula petunjuk jalan untuk memudahkan pengunjung mencapai lokasi. Berdasarkan hasil pra-wawancara dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pokdarwis menilai Ekowisata Mangrove Kali Lamong ini masih dalam tahap pengembangan sehingga belum diberlakukannya tiket masuk dan biaya parkir karena dirasa ekowisata ini belum

memiliki nilai jual yang terlalu tinggi sehingga pihak desa merasa daya tarik baik dari segi atraksi maupun fasilitas pada objek wisata dirasa masih kurang. Menurut penelitian (Putri et al., 2021), mengungkapkan bahwa nilai daya tarik yang tinggi akan terlihat dengan banyaknya jumlah atraksi, fasilitas, dan kualitas aksesibilitas yang baik.

Upaya pengembangan wisata Mangrove Kali Lamong menjadi suatu alternatif dalam peningkatan pendapatan masyarakat lokal berbasis potensi desa terkait dengan pelestarian lingkungan, tradisi, budaya, serta pemberdayaan masyarakat di Desa Sukorejo. Adanya peran masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan ekowisata mangrove dapat menumbuhkan lingkungan pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya pengembangan wisata untuk perekonomian tapi juga membantu melestarikan apa yang sebelumnya sudah ada. Berdasarkan penelitian (López-Sanz et al., 2021) menyatakan bahwa sejatinya terdapat banyak prospek pertumbuhan ekowisata dan berbagai kegiatannya jika ditangani dan dikembangkan dengan tepat. Dengan partisipasi masyarakat yang aktif dan berkelanjutan diharapkan dapat mengembangkan wisata yang lebih optimal sehingga dapat menarik pengunjung yang nantinya akan berdampak pula bagi pendapatan pedagang dan penyewaan yang ada di sekitar lokasi Ekowisata. Selain itu dengan adanya partisipasi masyarakat ini dapat tercipta rasa gotong royong dan kekeluargaan yang akan mempererat rasa kesatuan antar masyarakat.

Maka dari itu peneliti ingin menganalisis mengenai bentuk partisipasi masyarakat Desa Sukorejo dalam mengembangkan Ekowisata Mangrove Kali Lamong dengan menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh

Mulyadi (2019:25) yang mana dalam teori tersebut terdapat berbagai bentuk partisipasi masyarakat yaitu terdiri dari *participation in decision making*, *participation in implementation*, *participation in benefit*, dan *participation in evaluation*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif mengenai partisipasi masyarakat Desa Sukorejo dalam pengembangan Ekowisata Mangrove Kali Lamong. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Kali Lamong Desa Sukorejo Kabupaten Gresik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Ekowisata Mangrove Kali Lamong Desa Sukorejo Kabupaten Gresik?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Ekowisata Mangrove Kali Lamong Desa Sukorejo Kabupaten Gresik.”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bentuk partisipasi masyarakat ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya bidang pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta hubungan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini mampu menyuguhkan suatu pengalaman serta pengetahuan baru bagi penulis mengenai partisipasi masyarakat yang ada di Desa Sukorejo dalam pengembangan Ekowisata Kali Lamong.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan terhadap perbaikan dan evaluasi oleh pemerintah Desa Sukorejo Kabupaten Gresik beserta Pokdarwis dan masyarakat setempat agar selanjutnya dapat berkembang menjadi lebih baik

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dalam bentuk laporan yang komprehensif. Laporan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas peran serta partisipasi masyarakat.